

# EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Marshela Manurung

NPP. 30.1007

*Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan*  
*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: marshelamanurung06@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Ida Yunari Ristiani, SKM, MM

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The large number of residents in Banjarmasin City who have residential areas that are close to each other or can be called residential areas makes the risk of residential fires even higher. Residential fire disasters cause losses to the community, therefore the Banjarmasin City Fire and Rescue Service needs to pay attention to settlement fire disaster management so that they can run effectively. **Purpose:** To determine the effectiveness of settlement fire disaster management by the Banjarmasin City Fire and Rescue Service and to determine the factors that impede the effectiveness of settlement fire disaster management in the City of Banjarmasin. **Method:** The research method used is descriptive qualitative with interviews, observations and documents as data collection techniques. The analysis of settlement fire disaster management in the city of Banjarmasin uses the theory of Richard M. Steers in measuring effectiveness, namely Goal Achievement, Integration and Adaptation. **Results/Findings:** This study shows that the management of residential fire disasters by the Fire and Rescue Service of the City of Banjarmasin, South Kalimantan Province in achieving the objectives is quite effective, there are obstacles that occur, namely in the process of extinguishing residential fire disasters such as residential fire disaster locations that are dense with traffic with difficult road access. The integration has been effective. Adaptations to optimally support the extinguishing and rescue of residential fires are still ineffective, the reason being that they have not been able to equip adequate facilities and infrastructure due to the limited budget of the Banjarmasin City Fire and Rescue Service. **Conclusion:** The author concludes that the effectiveness of fire disaster management in tackling fire disasters in the City of Banjarmasin has not been carried out effectively because there are still several obstacles that the DPKP of Banjarmasin City has not been able to overcome properly.

**Keywords:** *Effectiveness, Disaster Management, Fire, Settlements.*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Banyaknya penduduk Kota Banjarmasin yang memiliki kawasan rumah yang saling berdekatan atau bisa disebut daerah permukiman membuat resiko kebakaran permukiman semakin tinggi. Bencana kebakaran permukiman memberikan kerugian terhadap masyarakat, oleh sebab itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin perlu memperhatikan penanggulangan bencana kebakaran permukiman agar bisa berjalan secara efektif. **Tujuan :** Untuk mengetahui efektivitas penanggulangan bencana kebakaran permukiman oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin serta mengetahui faktor yang menghambat efektivitas penanggulangan bencana kebakaran permukiman Kota Banjarmasin.

**Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumen-dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Analisis penanggulangan bencana kebakaran permukiman di Kota Banjarmasin menggunakan teori Richard M. Steers dalam pengukuran efektifitas yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana kebakaran permukiman oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencapaian tujuan sudah cukup efektif adanya hambatan yang terjadi yaitu pada proses pemadaman bencana kebakaran permukiman seperti lokasi bencana kebakaran permukiman yang padat lalu lintas dengan akses jalan yang sulit. Integrasi yang dilakukan sudah efektif. Adaptasi untuk menunjang optimalnya pemadaman dan penyelamatan kebakaran permukiman masih belum efektif penyebabnya adalah belum mampu memperlengkapi sarana dan prasarana yang memadai karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin. **Kesimpulan:** Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas penanggulangan bencana kebakaran dalam menanggulangi bencana kebakaran di Kota Banjarmasin belum dilakukan secara efektif karena masih ada beberapa hambatan yang belum dapat diatasi DPKP Kota Banjarmasin dengan baik.

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Penanggulangan Bencana, Kebakaran, Permukiman.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bencana alam adalah peristiwa yang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun hal ini bisa terjadi dikarenakan faktor alam itu sendiri dan kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga dan merawat alam. Dengan adanya bencana alam kehidupan manusia terancam dengan rasa ketidak amannya dan mengakibatkan kerugian. Setiap daerah memiliki potensi bencana alam yang berbeda sesuai kondisi alam daerah tersebut. Peran manusia sudah seharusnya cepat tanggap dalam menghadapi bencana yang tidak bisa diduga kapan terjadinya. Salah satunya adalah kebakaran.

Kebakaran adalah suatu peristiwa timbulnya api yang tidak diinginkan dan merusak suatu bangunan atau benda yang sulit untuk dikuasai dan merugikan. Kebakaran dapat dikategorikan sebagai bencana alam (*natural disasters*) maupun bencana non alam yang diakibatkan oleh keledoran manusia (*man-made disasters*). Kebakaran sering terjadi pada kawasan perkotaan daripada kawasan perdesaan, karena pusat pertumbuhan penduduk terpusat di perkotaan yang menyebabkan aktifitas di kawasan perkotaan semakin tinggi sehingga peluang terjadinya kebakaran di kawasan perkotaan lebih besar. Penanggulangan bencana kebakaran di kota-kota besar menimbulkan tantangan khusus dengan sumber daya yang terbatas, bekerja di lingkungan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, tingkat kriminalitas tinggi, meningkatkan hubungan dengan institusi di seluruh kota, menjangkau komunitas multikultural dan membuat penduduk berfokus pada keselamatan kebakaran.

Tercatat dan mendapat pengakuan dari MURI (Musium Rekor Dunia dan Indonesia) Kota Banjarmasin merupakan kota dengan 1000 Pemadam Kebakaran. Banyaknya pemadam kebakaran yang ada bukan hanya karena pemenuhan kewajiban oleh pemerintah tetapi masyarakat kota Banjarmasin ikut berperan serta yang biasa disebut pemadam kebakaran swadaya/swasta. Provinsi Kalimantan Selatan terkhususnya Kota Banjarmasin sangat sering terjadinya bencana kebakaran terutama didaerah permukiman. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 daerah permukiman Kota Banjarmasin data yang terjadi bahwa bencana kebakaran permukiman sebanyak 139 kejadian.

Besarnya dampak risiko bencana kebakaran pada permukiman di Kota Banjarmasin perlu ditangani dengan tepat dan cepat oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Banjarmasin. Pemerintah Indonesia telah memiliki Pemadam Kebakaran di seluruh titik wilayah Indonesia. Dinas Pemadam

Kebakaran adalah lembaga yang menanggulangi bencana terutama kebakaran yang bertanggung jawab dan merupakan perpanjangan tangan Walikota Banjarmasin.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman dalam menanggulangi bencana kebakaran permukiman di Kota Banjarmasin ini. Pada tahun 2019 terjadi kebakaran permukiman diangka paling tinggi dari tahun-tahun yang lainnya yaitu dengan angka 63 kasus kejadian kebakaran permukiman. Pada tahun 2019 menimbulkan kerusakan dengan angka yang tinggi dengan total 218 kerusakan permukiman. Pada tahun 2020, kejadian kebakaran mengalami penurunan yang cukup signifikan diangka 16 kejadian dengan total kerusakan permukiman 57. Data terakhir yang diperoleh, yaitu tahun 2021 kembali terjadi peningkatan angka kebakaran permukiman yaitu sebanyak 36 kejadian kebakaran permukiman dengan total kerusakan kebakaran permukiman 49. Berdasarkan data diatas, jumlah kasus kejadian bencana kebakaran mengalami fase naik turun dan tidak adanya konsistensi dalam tujuan upaya penanggulangan bencana kebakaran yang mengalami penurunan jumlah kejadian bencana kebakaran.

Kebakaran yang terjadi di permukiman menyebabkan kesulitan masyarakat dalam menjalani kehidupan karna banyaknya aktivitas yang terjadi sebagian besar didaerah permukiman. Meningkatnya kegiatan yang dilakukan masyarakat juga menyebabkan risiko potensi bencana kebakaran yang tinggi di daerah permukiman. Pastinya bencana kebakaran yang terjadi menimbulkan kerugian yang tidak mudah diterima masyarakat, kerugian dalam usaha perekonomian, lingkungan yang rusak karna dampak dari kebakaran, mengancam nyawa dan keselamatan jiwa manusia, tidak hanya itu trauma manusia dalam menghadapi kehilangan harta benda. Daerah perkotaan atau yang biasa disebut daerah permukiman memiliki risiko terjadinya kebakaran yang tinggi karena memiliki indikasi tingkat titik panas yang tinggi hal inilah yang menjadi faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kejadian kebakaran permukiman di Kota Banjarmasin.

Bencana Kebakaran memberikan dampak yang merugikan masyarakat dalam berkehidupan seperti kehilangan tempat tinggal,kerugian material dan non material. Perlu adanya mitigasi sampai penanggulangan menghadapi bencana Kebakaran tersebut. Bencana Kebakaran bukanlah bencana yang harus terus-terusan diterima dikehidupan bermasyarakat, tetapi bagaimana dengan tingkat kebakaran yang tinggi dan 1000 pemadam kebakaran yang dimiliki kota Banjarmasin mampu mempercepat penanganan kebakaran.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks strategi maupun menanggulangi bencana kebakaran. Penelitian Devi Damayanti,Neti Sunarti,Otong Husni Taufiq (2021) yang berjudul *Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran Oleh Unit Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Ciamis* adalah belum siapnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman betul mengenai pelayanan kebakaran, dan sarana prasarana yang tidak banyak sehingga mengalami banyak kekurangan. Pada penelitian Suci Rahmadhani, Zikri Alhadi (2021) yang berjudul *Efektivitas kinerja dinas pemadam kebakaran Kota Padang dalam pencegahan bahaya kebakaran* adalah belum optimal efektivitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Terkendalakarena sarana prasarana yang belum dipenuhi, kurangnya anggaran,dan kurangnya sumber daya manusia dalam berpartisipasi. Penelitian Yusri, Muhammad (2021) yang berjudul *Efektivitas pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran : Studi kasus Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung*, mendapatkan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran belum dinilai efektif karena salah satu kriteria efektivitas retribusi belum tercapai yakni kemampuan administrasi.

Dalam hal ini adanya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran inibelum dinilai efektif dalam hal pemungutan retribusinya. Penelitian Citra Puspita Dewi yang berjudul *Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Bencana Kebakaran Di Kota Yogyakarta* (Citra Puspita Dewi, 2017), berkaitan dengan pemberian bimbingan dan melaksanakan koordinasi, kerja sama yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Yogyakarta dengan instansi terkait dan lembaga lainnya. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pengelolaan sarana prasarana kebakaran. Penelitian selanjutnya milik Prima Widayanto yang berjudul *Analisis Kinerja Tim Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran Di Dinas Kebakaran Kota Semarang* (Prima Widayanto, 2016) tentang pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dinilai cukup dalam menangani bencana kebakaran karena SDM personil sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Secara keseluruhan, kelima penelitian sebelumnya sama-sama menilai pelaksanaan tugas untuk mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran, baik lahan dan hutan maupun di perkotaan atau pemukiman. Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu analisis terhadap dinas kebakaran sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Perbedaannya, pada penelitian kali ini peneliti menganalisis efektifnya pelayanan penanggulangan petugas pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran terutama yang sering terjadi di kota Banjarmasin khususnya kota Banjarmasin yakni kebakaran permukiman.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penanggulangan bencana kebakaran permukiman oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan semua data dalam bentuk verbal dari wawancara, tatap muka, foto, dan angka. Muri Yusuf (2014:329) mengemukakan pendapatnya tentang metode penelitian kualitatif yaitu Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap tiga orang informan yang terdiri dari Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, Kepala Bidang Pencegahan, Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis efektivitas penanggulangan bencana kebakaran permukiman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menanggulangi bencana kebakaran di Kota Banjarmasin. Dengan mengacu pada teori Efektivitas Organisasi oleh Richard M. Steers, peneliti menemukan dimensi dalam mengukur efektifnya kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, yaitu Pencapaian Tujuan, Adaptasi, dan Integrasi dalam menanggulangi bencana kebakaran permukiman di Kota Banjarmasin yang hasilnya adalah sebagai berikut:

### 3.1 Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

#### 1. Pencapaian Tujuan

Kegiatan yang mempunyai tujuan dengan menetapkan perencanaan, pengendalian, pengorganisasian dan manajemen untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran Daerah kabupaten/kota menyebutkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin harus menerapkan mutu pelayanan dasar sebagai berikut:

1. Layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
3. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
4. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
5. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

#### 1. Layanan respon cepat (*Response time*) penanggulangan kejadian kebakaran

Pada saat terjadi kebakaran permukiman *personil rescue* yang piket/bertugas pada hari itu akan menerima panggilan kemudian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin itu ada yang namanya *response time* 15 menit dari posko menuju ke TKP. Itu merupakan standar waktu pemadam kebakaran melakukan pemadaman api. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin menanggapi panggilan pada saat terjadinya kebakaran dengan cukup cepat karena setiap harinya ada *Personil Rescue* yang dibagi menjadi beberapa kelompok dan kemudian bertugas selama 24 jam bergantian shift dengan kelompok lainnya.

#### 2. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran

Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran adalah upaya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin untuk menanggulangi bencana kebakaran permukiman. DPKP Kota Banjarmasin setiap pelaksanaannya selalu didasari dasar hukum dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Setiap prosedur yang disusun yang sudah dipertimbangkan agar terwujudnya pekerjaan yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memudahkan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran dilakukan dengan prosedur operasional yang berarti langkah-langkah atau proses yang dilakukan pada saat terjadinya penanggulangan bencana kebakaran permukiman di Kota Banjarmasin serta merupakan susunan rencana aksi kerja yang direncanakan dan disepakati untuk dilaksanakan secara kolektif dalam kurun waktu tertentu.

#### 3. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;

Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah kegiatan dan upaya untuk mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia dan harta benda dari bencana. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP Kota Banjarmasin tidak hanya memadamkan api pada saat terjadi kebakaran namun penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Petugas damkar memastikan masyarakat yang menjadi korban kebakaran dalam keadaan aman dan dijauhkan dari ancaman bahaya. DPKP Kota Banjarmasin dalam upaya melayani korban kebakaran permukiman melakukan koordinasi dengan instansi lainnya agar penyelamatan dan evakuasi korban dapat dilakukan secara efektif sesuai tupoksi bagian instansi tersebut. Pada saat terjadi kebakaran permukiman petugas mencari korban apabila ada korban yang mengalami bencana akibat kebakaran petugas akan berusaha memberikan pertolongan pertama ditempat evakuasi serta berkoordinasi dengan rumah sakit untuk mengirimkan ambulance ke tempat evakuasi. DPKP Kota Banjarmasin memberikan pelayanan penyelamatan evakuasi dengan melakukan koordinasi kepada instansi lembaga terkait.

#### 4. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran

Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang tinggal dan hidup di suatu lingkungan, masyarakat dapat dikatakan sebagai bagian dari korban langsung dan sebagai relawan di daerah permukiman yang rawan terjadi bencana kebakaran. Keterlibatan masyarakat/relawan Kota Banjarmasin dalam pemadaman kebakaran merupakan upaya pencapaian tujuan visi misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin untuk mencegah dan memadamkan kebakaran. Meskipun banyak masyarakat yang terpanggil mengambil bagian dalam memadamkan kebakaran permukiman dan menjadi relawan bencana kebakaran permukiman masih akan terus bertambah apabila masih kurang kesadaran yang dimiliki masyarakat. Kelalaian dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran merupakan hambatan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin yang harus segera dibenahi.

#### 5. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran adalah bentuk penanggulangan bencana kebakaran permukiman pasca bencana. Tugas tersebut terdiri dari pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen penilaian risiko, implementasi program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, pengumpulan data, inventarisasi, evaluasi dan pengendalian serta inspeksi lokasi peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Pada layanan pendataan dan investigasi pasca bencana kebakaran BPBD berkerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas PU untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dan bantuan pertama DPKP Kota Banjarmasin bersama OPD terkait melakukan pendataan, pengecekan dan mengevaluasi apa kendala yang menghambat penanggulangan bencana kebakaran permukiman. DPKP Kota Banjarmasin mengupayakan memberikan rehabilitasi atas trauma masyarakat korban bencana kebakaran permukiman dan rekonstruksi atas bangunan yang habis.

## 2. Integrasi

Integrasi juga dapat diartikan sebagai metode koordinasi fungsi yang berbeda, bagian dan tugas di tempat kerja. Dengan kata lain, integrasi adalah cara bekerja sama yang tidak bertentangan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.

### a. Sosialisasi dan Pelatihan Kesiapsiagaan Kebakaran Permukiman

Dalam upaya mencegah kebakaran permukiman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin memiliki program dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan. DPKP Kota Banjarmasin dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran dan permukiman serta upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana harus bertindak ketika terjadi kebakaran dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan kebakaran permukiman. Sumber api masyarakat adalah kompor listrik dan gas, api dapat ditanggulangi tepat waktu sehingga tidak terjadi bencana kebakaran yang berskala besar, masyarakat dapat mempraktekkan pemadaman api dengan alat sederhana seperti kain/handuk basah. Masyarakat harus mengenali darimana sumber api yang ada di masyarakat, apa yang harus dilakukan pada saat terjadi kebakaran. Masyarakat diberikan sosialisasi agar mampu menghadapi dan mencegah kebakaran yang semakin besar. Pada saat terjadi kebakaran permukiman dapat meminta bantuan tetangga dan simpan nomor darurat untuk kebakaran yang meluas, misalnya nomor kantor pemadam kebakaran, kantor polisi, ambulans.

b. Sosialisasi terhadap *stakeholder* bencana kebakaran permukiman

Dalam menanggulangi bencana kebakaran permukiman DPKP Kota Banjarmasin melakukan koordinasi terhadap instansi lembaga terkait mengenai kebencanaan. Pemerintah Kota Banjarmasin sudah membuat regulasi khusus yang mengatur segala bentuk penanganan mengenai bencana kebakaran di Kota Banjarmasin yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Regulasi yang ada menjadi dasar dinas yang ada di Kota Banjarmasin. Hingga saat ini setiap bangunan di Kota Banjarmasin sudah memperlengkapi dengan peralatan dan alat pemadam kebakaran minimal, sehingga dapat dikatakan sosialisasi terhadap *stakeholder* terjadi secara efektif.

### 3. Adaptasi

Adaptasi/penyesuaian diri adalah mengubah sesuai dengan kondisi lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan kondisi (kehendak diri). Adaptasi yang dibahas kali ini mengenai bagaimana DPKP Kota Banjarmasin mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi dalam menghadapi bencana kebakaran permukiman. Adaptasi perlu dilakukan mengingat semakin majunya era maka Pemerintah harus mampu menyesuaikan untuk mencapai tujuan menanggulangi bencana dengan efektif. Salah satu kelemahan DPKP adalah dalam penanggulangan bencana kebakaran permukiman adalah mengenai adaptasi sesuai kondisi lingkungan. Mengingat kebakaran permukiman yang menjadi resiko yang cukup besar di Kota Banjarmasin sehingga penyesuaian yang menjadi hambatan adalah seperti penyesuaian peningkatan kelengkapan sarana prasarana pemadam kebakaran dan keterbatasan peningkatan dana yang dimiliki DPKP Kota Banjarmasin sehingga membuat DPKP kesulitan untuk menyesuaikan lingkungan yang memerlukan sarana dan prasarana yang layak dan dengan jumlah yang cukup. DPKP Kota Banjarmasin belum maksimal dalam adaptasi/penyesuaian lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran permukiman. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki DPKP sendiri masih terbilang belum lengkap karena untuk penyesuaian peningkatan kelengkapan sarana prasarana tersebut disebabkan keterbatasan peningkatan dana.

#### 3.2 Faktor Penghambat Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

1. Sarana dan prasarana dengan jumlah yang ada belum cukup memenuhi kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin dalam mengatasi bencana kebakaran permukiman di Kota Banjarmasin.
2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki DPKP membuat penanggulangan bencana kebakaran permukiman tidak terjadi secara efektif dan mengakibatkan kesulitan memperlengkapi sarana prasarana, kemudian kesulitan pemberian bantuan bagi warga yang terdampak bencana kebakaran permukiman.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran dan kurangnya perhatian/kelalaian manusia menyebabkan bencana kebakaran semakin meningkat.
4. Akses jalan yang sulit untuk mobil pemadam kebakaran pemerintah atau BPK Swadaya mencegah pemadaman api dan kemungkinan api menyebar lebih jauh.

### 3.3 Upaya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin dalam Menghadapi Hambatan yang Terjadi

1. Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperlengkapi jumlah sarana dan prasarana.
2. Mengelola anggaran dana bencana kebakaran permukiman.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana kebakaran.
4. Penyediaan APAR di beberapa titik permukiman sehingga petugas damkar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam menanggulangi bencana kebakaran permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan melaksanakan program-program yang sudah direncanakan agar terlaksananya kinerja yang efektif dan efisien. Penulis menemukan temuan penting pada penelitian ini, yakni masyarakat di daerah permukiman masih belum mengetahui apa saja langkah yang dilakukan ketika terjadi kebakaran karena masyarakat belum menyadari akan pentingnya menjaga aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin belum cukup untuk kondisi Kota Banjarmasin yang sering terjadi kebakaran permukiman. Sama halnya dengan temuan Devi Damayanti dkk, bahwa belum siapnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman betul mengenai pelayanan kebakaran, dan sarana prasarana yang tidak banyak sehingga mengalami banyak kekurangan (Devi Damayanti dkk, 2021). Belum optimal efektivitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Terkendala karena sarana prasarana yang belum dipenuhi, kurangnya anggaran, dan kurangnya sumber daya manusia dalam berpartisipasi. Sehingga dapat dikatakan kinerja dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang belum maksimal dalam pelayanannya (Suci Rahmadhani dkk, 2021).

Program pelatihan yang diberikan pemerintah bagi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin bertujuan untuk meningkatkan *skill* dalam menanggulangi bencana kebakaran dan penyelamatan. Adanya koordinasi yang baik antar OPD terkait penanggulangan kebakaran seperti Polri, Pol PP, dan mitra kerja lainnya (BPK Swasta, Balakar, dan Relawan). Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya kebakaran dan bagaimana masyarakat harus bertindak ketika terjadinya kebakaran. Layaknya temuan Citra Puspita Dewi yaitu pemberian bimbingan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Yogyakarta dengan instansi terkait dan lembaga lainnya. Dengan adanya koordinasi muncul suatu keterkaitan antara satu dengan lainnya. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan rapat langsung, surat dan telepon. Dari kegiatan koordinasi terjadi jalinan komunikasi yang dapat saling membantu dalam penanganan bencana di wilayah DIY juga terjadi pertukaran informasi, sehingga didapatkan informasi yang baru (Citra Puspita Dewi, 2017).

Strategi program yang diterapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran harus didasari *skill* yang mumpuni bagi setiap anggotanya, maka dari itu pemerintah daerah Kota Banjarmasin selalu memberikan pelatihan dan pengembangan untuk petugas pemadam kebakaran. Adanya bantuan masyarakat dalam membentuk organisasi BPK Swadaya dapat membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam menanggulangi bencana kebakaran. Layaknya temuan Yusri, Muhamad retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran belum dinilai efektif karena salah satu kriteria efektivitas retribusi belum tercapai yakni kemampuan administrasi. Dalam hal ini arinya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini belum di nilai efektif dalam hal pemungutan retribusinya. Hambatan yang terjadi dalam pemungutan retribusi ini ada belum adanya petugas khusus yang bertugas melakukan pemungutan retribusi sehingga membuat proses pemungutan tidak berjalan efektif. Upaya untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah mengajukan beberapa ASN yang terlatih untuk menutupi



tidak adanya petugas khusus pemungutan retribusi tersebut (Yusri,Muhamad, 2021).

Hambatan yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, antara lain kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat akan terjadinya bencana kebakaran, kondisi permukiman kota Banjarmasin yang padat dan berdempetan membuat lajunya persebaran api ke wilayah sekitar. Sesuai dengan temuan dari Prima Widayanto penurunan presentase hasil penanganan oleh tim dikarenakan semakin meningkatnya jumlah kebakaran yang tidak diimbangi dengan manajemen personil pemadam dan sarana sehingga dalam melakukan tugasnya tim mengalami kendala dan hambatan. Minimnya jumlah personil dan pos pemadam serta kondisi pos yang jauh dari lokasi kebakaran menyebabkan waktu tanggap pada saat penanganan melebihi waktu tanggap 15 menit yang mengakibatkan kerugian tidak bisa diminimalisasi (Prima Widayanto,2016).

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam menanggulangi bencana kebakaran di Kota Banjarmasin, yaitu kurangnya jumlah kelengkapan sarana dan prasarana yang berkualitas, keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran, dan akses jalan yang sulit dilalui petugas damkar, sehingga empat hal tersebut membuat penanggulangan bencana kebakaran permukiman masih belum dilakukan secara maksimal.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas penanggulangan bencana kebakaran dalam menanggulangi bencana kebakaran di Kota Banjarmasin belum dilakukan secara efektif karena masih ada beberapa hambatan yang belum dapat diatasi DPKP Kota Banjarmasin dengan baik. Sesuai dengan dimensi dan indikator yang diperoleh menggunakan teori Richard M. Steers yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil analisa yang didapatkan dari pembahasan tersebut terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya jumlah kelengkapan sarana dan prasarana yang berkualitas, keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran, dan yang terakhir akses jalan yang sulit dilalui petugas damkar, sehingga empat hal tersebut membuat penanggulangan bencana kebakaran permukiman masih belum dilakukan secara maksimal. Dengan teori Richard M. Steers juga didapatkan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada adalah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperlengkapi jumlah sarana dan prasarana, mengelola anggaran dana bencana kebakaran permukiman, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana kebakaran, dan yang terakhir penyediaan APAR di beberapa titik permukiman sehingga petugas damkar mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama, yakni waktu dan biaya penelitian. Di mana waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas mengakibatkan peneliti sulit mendapatkan waktu yang lebih lama observasi lapangan yang seharusnya membutuhkan waktu yang cukup lama.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas penanggulangan bencana kebakaran permukiman Kota Banjarmasin dalam menanggulangi bencana kebakaran untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- A, Muri Yusuf. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.
- Citra Puspita Dewi. 2017. Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Bencana Kebakaran Di Yogyakarta.
- Devi Damayanti. 2021. Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran Oleh Unit Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Ciamis, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 7(1).
- Fatmawati, Ratri 2009. *Audit Keselamatan Kebakaran di Gedung PT. X Jakarta tahun 2009*. Skripsi Program Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Depok
- Prima Widayanto (2016). Analisis Kinerja Tim Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran Di Dinas Kebakaran Kota Semarang
- Yusri, Muhammad (2021). Efektivitas Pemungutan Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran : Studi kasus Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Steers, R. M. 1980. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Rahmadhani, S., & Alhadi, Z. (2021). Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(3),
- Suprpto. 2007. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif Kaitannya dengan Aspek Keselamatan Jiwa. (*Passive fire protection and life safety*), *Jurnal Permukiman*. Vol. 2(2).